

TESIS

**KETAATASASAN PENGGUNAAN ATURAN HUKUM
OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR SIKKA
DALAM PERKARA KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK PEREMPUAN**



**MARIA NOVIYANTI METI
No. Mhs: 225214742**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA
2024**



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM**

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : MARIA NOVIYANTI METI

Nomor Mahasiswa : 225214742/PS/MIH

Konsentrasi : Hukum Litigasi

Judul Tesis : KETAATASASAN PENGGUNAAN ATURAN
HUKUM OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR
SIKKA DALAM PERKARA KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK PEREMPUAN

Disetujui Oleh:

Nama Pembimbing Tanggal Tanda Tangan

Prof. Dr. Dra. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum 13 Maret 2024

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum 13 Maret 2024



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : MARIA NOVIYANTI METI
Nomor Mahasiswa : 225214742/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Litigasi
Judul Tesis : KETAATASASAN PENGGUNAAN ATURAN HUKUM OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR SIKKA DALAM PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PEREMPUAN

Telah diuji dan dinyatakan lulus dihadapan dewan penguji pada tanggal 21 Maret 2024

Dewan Penguji

Nama

- | | |
|---------------|---|
| 1. Ketua | Prof. Dr. Dra. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum |
| 2. Sekretaris | Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum |
| 3. Anggota | Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum |

Tanda tangan

Ketua Program Studi

Dr. Triyana Yohanes, S.H., MHum

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maria Noviyanti Meti

No. Mahasiswa : 225214742

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul:

“KETAATASASAN PENGGUNAAN ATURAN HUKUM OLEH PENYIDIK
KEPOLISIAN RESOR SIKKA DALAM PERKARA KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK PEREMPUAN”

Adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila di kemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis saya tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sleman, 25 Maret 2024

Yang menyatakan



Maria Noviyanti Meti

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Bunda Maria atas berkat, rahmat dan kasih-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah Tesis yang berjudul “KETAATASASAN PENGGUNAAN ATURAN HUKUM OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR SIKKA DALAM PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PEREMPUAN”. Penulis menyadari dalam menyelesaikan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan saran dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan limpah terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurharanto, S.H., LL.M. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Ibu Prof. Dr. Dra. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I untuk segala bimbingan, masukan, dan arahan selama proses penyusunan tesis ini.
5. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II untuk segala bimbingan, masukan, dan arahan selama proses penyusunan tesis ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan pengajaran dan pengetahuan selama ini.

7. Staf Bagian Tata Usaha dan Bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang dengan setia dan tanggungjawab memberikan pelayanan bagi penulis dan seluruh mahasiswa.
8. Pihak Kepolisian Resor Sikka dan Pihak TRUK-F yang telah membantu penulis dalam proses penelitian dan perolehan data terkait kekerasan seksual terhadap anak perempuan.
9. Pihak Yayasan Jurnal Perempuan yang telah memberikan beasiswa, ruang diskusi dan magang bagi penulis sampai dengan proses penyelesaian tesis ini.
10. Bapak Didimus Didi, Mama Agnes Nirong, Kakak Oktavianus Tado, Kaka Paskalis Helero, dan Adik Kristina Eufrasia Hogar serta keluarga besar Maumere, Larantuka, Bali yang selalu mendukung, mendoakan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Petrus Fidelis Ngo sebagai partner terbaik dalam berdiskusi dan bertukar ide serta mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
12. Thin, Sasha, Meggy, Ayu, Angelica, Lita, Mia, Prima, Andika, Aldy, dan sahabat-sahabat seperjuangan magister hukum angkatan 2022 atas dukungan dan kebersamaan selama ini.
13. Besti-Besti dan Adik-Adik tersayang: Cha, Icha, Cici, Nunik, Icing, Mery, Tisa, Yoan, Jado, There, Ando Sola, Livia, Ade Ebby, Nona Indri, Meysi, Resta, Resti, dan Mba Eni atas dukungannya selama ini.
14. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam proses penyelesaian tesis ini, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini bukan merupakan sebuah analisis ilmiah yang sempurna. Banyak hal yang masih kurang dan harus diperbaiki. Oleh karena itu, penulis membuka ruang bagi kritik dan saran dari para pembaca demi kemajuan tesis ini

di masa mendatang. Kritik dan saran yang konstruktif menjadi senjata yang berguna untuk meluruskan pemahaman penulis. Akhir kata, selamat membaca dan semoga tercerahkan.

Yogyakarta, 12 Maret 2024



Maria Noviyanti Meti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN TESIS	ii
PENGESAHAN TESIS.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Batasan Konsep	14
G. Sistematika Penulisan Tesis	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Peraturan Perundang-undangan Kekerasan Seksual terhadap Anak Perempuan ..	18
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	19
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	21
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	24
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana	

Anak	28
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	31
B. Asas Berlakunya Peraturan Perundang-undangan	41
1. Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori	41
2. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis.....	45
3. Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori	50
C. Kewenangan Penyidik dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual	54
D. Landasan Teori	57
1. Teori Penalaran Hukum (<i>Legal Reasoning Theorie</i>)	57
2. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman	60
BAB III METODE PENELITIAN	64
A. Jenis Penelitian.....	64
B. Pendekatan Penelitian	64
C. Sumber Data.....	65
1. Bahan Hukum Primer	65
2. Bahan Hukum Sekunder.....	67
D. Metode Pengumpulan Data.....	68
1. Studi Kepustakaan.....	68
2. Wawancara	68
E. Metode Analisis Data.....	69
1. Bahan Hukum Primer	69
2. Bahan Hukum Sekunder.....	75
3. Bahan Hukum Primer dan Sekunder	76
F. Proses Berpikir/Prosedur Bernalar.....	77
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	78
A. Monografi Kabupaten Sikka	78

1. Pendidikan.....	78
2. Budaya	81
B. Korban Kekerasan Seksual dan Model Pendampingannya Oleh Tim Relawan Untuk Kemanusian Flores (TRUK-F)	84
1. Sejarah TRUK-F	84
2. Data Korban dan Model Pendampingan yang Dilakukan TRUK-F	85
C. Penanganan Perkara Kekerasan Seksual terhadap Anak Perempuan oleh Penyidik Kepolisian Resor Sikka yang Mengakomodasi Asas Keberlakuan Hukum.....	88
1. Proses Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Perempuan oleh Penyidik Kepolisian Resor Sikka	88
2. Penerapan Peraturan Perundang-undangan Dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Perempuan oleh Kepolisian Resor Sikka	105
3. Analisis Penerapan Peraturan Perundang-undangan Menurut Asas Keberlakuan Hukum dengan Menggunakan Teori Penalaran Hukum.....	107
D. Kajian Tentang Kepatuhan Penyidik Kepolisian Resor Sikka dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Perempuan.....	115
1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Asas Keberlakuan Hukum dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Perempuan: Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence Freidman	115
2. Konsekuensi dari Penerapan Penerapan Peraturan Perundang-undangan yang Sesuai dengan Asas Keberlakuan Hukum.....	121
BAB V PENUTUP	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA	138

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Data Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Perempuan dan UU yang Dipakai sebagai Dasar Hukum oleh Kepolisian Resor Sikka Tahun 2021	89
Tabel 2: Data Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Perempuan dan UU yang Dipakai sebagai Dasar Hukum oleh Kepolisian Resor Sikka Tahun 2022	93
Tabel 3: Data Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Perempuan dan UU yang Dipakai sebagai Dasar Hukum oleh Kepolisian Resor Sikka Tahun 2023	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Tabel Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Usia dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Sikka, Maret 2023	80
--	----

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui proses penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak perempuan oleh penyidik Kepolisian Resor Sikka yang mengakomodasi ketentuan asas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis sesuai tidaknya penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak perempuan oleh penyidik Kepolisian Resor Sikka dengan asas hukum yang berlaku. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh adalah penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak perempuan oleh penyidik Kepolisian Resor Sikka, menekankan pada penggunaan asas keberlakuan hukum dalam peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang berlaku. Meskipun mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai asas *lex specialis derogat legi generalis* dan sebagai dasar dalam penegakan hukum, temuan menunjukkan adanya kekurangan dalam pemahaman dan penerapan asas keberlakuan hukum serta asas-asas hukum yang relevan. Pentingnya pemahaman dan kesadaran akan asas keberlakuan hukum di kalangan penyidik disoroti, bersama dengan perlunya penerapan hukum yang konsisten dan menyeluruh dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi penyidik untuk menangani kasus tersebut dengan efektif sesuai dengan asas keberlakuan hukum yang berlaku. Penggunaan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan komitmen terhadap perlindungan hak anak, tetapi juga menyoroti perlunya penerapan hukum yang tepat dan berlandaskan pada asas-asas hukum yang berlaku secara konsisten.

Kata Kunci: Ketaatasasan penggunaan aturan hukum; Penyidik Kepolisian Resor Sikka; Kekerasan Seksual; Anak Perempuan.

ABSTRACT

*This research aims to examine and understand the process of handling cases of sexual violence against female children by investigators of the Sikka District Police, accommodating the principles of existing legal regulations. The study also aims to analyze whether the handling of cases of sexual violence against female children by investigators of the Sikka District Police is in accordance with applicable legal principles. This research is a normative study employing a case approach. This research utilizes secondary data sources, including primary legal materials and secondary legal materials. The research findings highlight the handling of cases of sexual violence against female children by investigators of the Sikka District Police, emphasizing the application of the principle of legal validity in legislation and applicable legal principles. Despite referring to Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection as the *lex specialis derogat legi generalis* and the basis for law enforcement, the findings indicate deficiencies in understanding and applying the principle of legal validity, as well as relevant legal principles. The importance of understanding and awareness of the principle of legal validity among investigators is emphasized, along with the need for consistent and comprehensive legal application in handling cases of sexual violence. Furthermore, there is a need for capacity building and training for investigators to effectively handle such cases in accordance with the applicable legal principles. The use of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 reaffirms the commitment to child rights protection but also underscores the necessity of proper legal application based on consistent legal principles.*

Keywords: Legal validity; Sikka District Police investigators; Sexual Violence; Female Children.